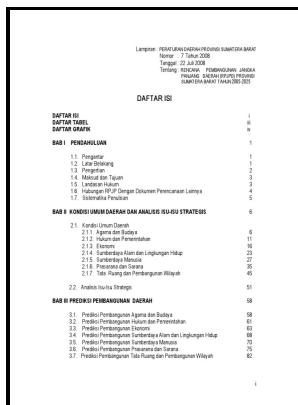


Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD) Propinsi Sumatera Barat tahun 2008

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Propinsi Sumatera Barat - Perda No.2 Th 2007 Tentang Pokok



Description: Work plan for year 2007 of Sumatera Barat Province.

-Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD) Propinsi Sumatera Barat tahun 2008

-Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD) Propinsi Sumatera Barat tahun 2008

Notes: Microfiche. Jakarta : Library of Congress Office ;

Washington, D.C. : Library of Congress Photoduplication Service.

2008. 11 microfiches. Master microform held by: DLC.

This edition was published in 2007



Filesize: 61.39 MB

Tags: #Search #[JDIH #BPK #RI]

PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2007

BAB V PERSONEL, ASET, DAN DOKUMEN Pasal 14 1 Bupati Nias bersama Penjabat Bupati Nias Barat menginventarisasi, mengatur, serta melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset dan dokumen kepada Pemerintah Kabupaten Nias Barat.

Himpunan Peraturan Pertanahan

A 2013 24 2013 25 2013 26 2013 25. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.

Himpunan Peraturan Pertanahan

Pasal 55 1 Setiap orang atau Badan dilarang menyadap air dari saluran pembawa pada tempat selain dari pada yang telah ditentukan. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan tertentu skala propinsi 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ; 6.

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR : 21 TAHUN 2017 TENTANG PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Oleh sebab itu, dilakukanlah penelitian untuk menguji keberadaan tanah ulayat di Sumatera Barat pada tahun 2001. Pasal 12 1 Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Nias Barat, dibentuk perangkat daerah yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, dan unsur perangkat daerah yang lain dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Search [JDIH BPK RI]

Fokus pengaturan terhadap tanah saja sudah terlihat dari dasar hukum dan sejumlah ketentuan pada batang tubuh yang tunduk pada konstruksi hukum pertanahan nasional.

Related Books

- [Forces](#)
- [Igreja Católica no Brasil-República - cem anos de compromisso \(1889-1989\)](#)
- [Engendering school learning - science, attitudes and achievement among girls and boys in Botswana](#)
- [Fra dialetto e lingua nazionale - realtà e prospettive : XVIII convegno di studi dialettali italiani](#)
- [Every man his own broker, or, A guide to the Stock-exchange](#)